LAPORAN PPM

Etika dan Tanggung Jawab: Refleksi Praktik Profesi Mahasiswa di Lembaga Legislatif

Disusun Oleh :

Sulis Setia Ningsih

NIM : 21.10.1.211.021

Pembimbing :

Zaenal Abidin, M.Ud.

Laporan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh nilai PPM

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA

JAKARTA

2023-2024

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG LAPORAN PPM

LEMBAR PERSETUJUAN
SIDANG LAPORAN PPM STAI SADRA

Laporan PPM ini berjudul :
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB :
Refleksi Praktik Profesi Mahasiswa di Lembaga Legislasi

Disusun Oleh:

Nama : **Sulis Setia Ningsih**
NIM : **21.10.1.211.021**
Prodi : **Akidah dan Filsafat Islam**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk disidangkan pada sidang laporan PPM.

Demikian surat persetujuan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta 03 September 2024

Zainal Abidin, M.Ud.
(Dosen Pembimbing)

LEMBAR PENGESAHAN

SIDANG LAPORAN PRAKTIK PROFESI MAHASISWA (PPM) STAI SADRA

Laporan PPM ini disusun oleh:

Nama : Sulis Setia Ningsih

NIM : 21.10.1.211.021

Prodi : S1 Akidah dan Filsafat Islam

Judul : **Etika dan Tanggung Jawab: Refleksi Praktik Profesi Mahasiswa di Lembaga Legislatif**

Telah disahkan oleh dewan sidang:

(Nama)	**(Nama)**
Ketua/Penguji	*Penguji*
Tanggal:	Tanggal:
(ttd)	**(ttd)**

(Nama)

Sekretaris

Tanggal:

(ttd)

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Disusun oleh :

Sulis Setia Ningsih

NIM : 21.10.1.211.021

Dosen Pembimbing : Zaenal Abidin, M.Ud.

Laporan PPM diajukan sebagai syarat kelulusan mata kuliah PPM

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulisan laporan PPM ini merupakan kerja asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat dalam laporan ini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya plagiasi, maka penulis siap untuk menerima sanksi akademik dalam bentuk pembatalan nilai yang diperoleh.

Jakarta, 04 September 2024

Yang membuat pernyataan,

Sulis Setia Ningsih

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG LAPORAN PPM i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR LAMPIRAN vii
KATA PENGANTAR viii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) 3
C. Kegunaan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) 4
D. Tempat PPM 5
E. Waktu dan prosedur Pelaksanaan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) 6
BAB II 9
A. GAMBARAN UMUM 9
1. Sejarah dan *Profile* Lembaga 9
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 17
3. Ruang lingkup Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) 18
B. Deskripsi Khusus 19
1. Sejarah pembentukan Fraksi 19
2. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) 20
3. Visi dan Misi Partai Amanat Nasional (PAN) 22

4. Struktur Anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) 23
BAB III 27
PELAKSANAAN 27
A. Kedudukan 27
B. Bidang Kerja 27
C. Pelaksanaan kegiatan 28
C. Analisis Pelaksanaan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) 43
1. Kendala yang dihadapi penulis 43
2. Cara Mengatasi Kendala 44
BAB IV 43
KESIMPULAN DAN SARAN 43
A. KESIMPULAN 43
B. SARAN 43
DAFTAR PUSTAKA 46
LAMPIRAN-LAMPIRAN 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Prosesi Sidang Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V 29
Gambar 3. 2 Rapat Paripurna ke-22 Penutupan Masa Persidangan V Tahun sidang 2023-2024 30
Gambar 3. 3 Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah dan DPD RI 32
Gambar 3. 4 Rapat Pleno Pembahasan RUU yang akan di Carry Over 34
Gambar 3. 5 Rapat di Fraksi penyusunan DIM RUU Paten 2024..... 35
Gambar 3. 6 Diskusi F-PAN DPR RI 37
Gambar 3. 7 Diskusi F-PAN DPR RI 38
Gambar 3. 8 Raker dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi 40
Gambar 3. 9 RDP dengan kepala BMKG dan BNPP/Basarnas 40
Gambar 3. 10 RDPU Komisi X DPR RI dengan Forum Guru..... 42

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Masa Periode DPR RI 10
Tabel 2. 2 Fraksi yang ada di DPR RI 19
Tabel 2. 3 Daftar Pimpinan Fraksi PAN 21
Tabel 2. 4 Struktur anggota DPR RI dari Fraksi PAN 23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....47
Lampiran 2.....48
Lampiran 3.....49
Lampiran 4.....50
Lampiran 5.....51
Lampiran 6.....52
Lampiran 7.....53
Lampiran 8.....56
Lampiran 9.....66
Lampiran 10.....67

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmannirrahīm

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillāhirabbil 'ālamīn, segala puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terkhusus bagi penulis sehingga dapat menyusun serta menyelesaikan tugas praktik profesi mahasiswa. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Saw.

Ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang senantiasa ada dan mendorong penulis dalam praktik profesi mahasiswa maupun proses penyusunan laporan ini, terkhusus kepada: .

1. Prof. Dr. Hossein Mottaghi selaku direktur Yayasan Hikmat Al-Mustafa dan Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag. selaku ketua STAI Sadra yang telah memfasilitasi dan memberikan izin dalam melaksanakan Praktik Profesi Mahasiswa ini.
2. Dosen mata kuliah Metodologi Penelitian , Basrir Hamdani, Ph.D yang telah memberikan arahan seputar kegiatan penulisan laporan Praktik Profesi mahasiswa.
3. Dosen Pembimbing , Zaenal Abidin, M.Ud. yang telah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk membimbing penulis dan selalu memberikan masukan yang memotivasi.
4. Ibu Annisa Zakiah, Psb, S.Sos yang telah mengarahkan dan membantu penulis dalam mengupayakan sehingga dapat melaksanakan magang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

5. Kepada Bapak Kumarudin, M.A. yang sudah sabar dalam membimbing dalam proses kegiatan ini selaku penanggung jawab magang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
6. Kepada Ibu Asrama Reni Rosyida yang dengan senang hati memberikan kelonggaran penulis selama kegiatan ini berlangsung.
7. Ibu selaku orang tua yang dari sebelum Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) ini dimulai sudah mendoakan dan memberikan dukungan penuh baik secara langsung dan tidak langsung
8. Kepada Opung yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan memotivasi untuk menyelesaikan tanggung jawab sampai akhir, yang di mana beberapa hari sebelum Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) ini selesai beliau sudah meninggalkan dunia dengan tenang.
9. Kepada sahabat dan teman dekat yang selalu mendukung dan memberikan waktunya mendengarkan keluhan selama kegiatan ini berlangsung.
10. Kepada diri sendiri yang sudah bisa menyelesaikan kegiatan ini sampai akhir.

Jakarta, 04 September 2024

Penulis

Sulis Setia Ningsih

21.10.1.211.021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) merupakan kegiatan wajib yang dilakukan mahasiswa yang menjadi sebuah syarat untuk melanjutkan ke jenjang akhir. Dalam beberapa instansi pendidikan memiliki aturan dan kebijakan yang berbeda. Kegiatan ini ditujukan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) sangat penting untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat mengembangkan komunikasi dan cara bekerja di sebuah perusahaan atau instansi, karena teori tidak selamanya berjalan dengan semestinya dan juga tidak sesuai dengan praktik secara langsung. Melalui kegiatan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) mahasiswa dihimbau dapat mengembangkan diri sebagai tenaga profesional yang dilatih untuk memasuki dunia pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan.

Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) juga merupakan bentuk kepedulian institusi pendidikan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang profesional di mana mahasiswa diterjunkan ke dalam berbagai bidang untuk mengamati dan mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh, sehingga mahasiswa dapat memperoleh bekal dan pengalaman faktual untuk mengembangkan diri sebagai tenaga ahli yang bertanggung jawab.

Minat yang besar terhadap isu politik dan ingin meningkatkan pemahaman dasar terkait dengan hukum dan politik. Melalui Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) ini penulis dapat memperoleh pengalaman langsung dalam lingkungan parlemen. Hal ini yang membantu penulis memahami struktur dan fungsi dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara keseluruhan dan bagaimana Fraksi-fraksi beroperasi mendukung proses legislasi dan pengawasan terhadap eksekutif, pembuatan undang-undang dan

peran diplomasi parlemen. Penulis juga ingin meningkatkan pemahaman dasar terkait dengan hukum dan politik oleh karenanya kegiatan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan di tempatkan di salah satu Fraksi Parpol (Partai Politik) memberikan kesempatan penulis untuk mempelajari proses politik yang berlangsung dilembaga legislatif yaitu analisis dan evaluasi terhadap kebijakan yang dihasilkan. Fraksi Partai Amanat Nasional dikenal sebagai fraksi yang berkomitmen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penulis ingin memahami bagaimana fraksi ini berpartisipasi dalam proses pembuatan undang-undang dan bagaimana mereka mendorong kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat.

Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) merupakan program yang menjadi bagian dari mata kuliah yang wajib sebagai salah satu syarat kelulusan di STAI SADRA dengan bobot 3 (tiga) SKS dan pelaksanaannya dilakukan di akhir masa semester 6 (enam). Kegiatan ini menjadi sarana untuk mendorong mahasiswa dalam mengembangkan minat dan kemampuan mahasiswa dalam mengkritisi suatu informasi, berpikir kreatif, tanggung jawab, *problem solving* dan komunikatif dalam mengeluarkan pendapat secara logis dan tepat berdasarkan bidang yang telah dipelajari.

Bagi lulusan program studi Aqidah dan Filsafat Islam analisis masalah yang mendalam menjadi sumber pencarian yang objektif dan kritis sehingga menghasilkan sesuatu yang konkret. Oleh karenanya profil profesi yang penulis ambil yaitu menjadi seorang jurnalis, hal ini karena lulusan Aqidah dan Filsafat dibekali dengan keterampilan kritis dan analitis yang dibutuhkan seorang jurnalis untuk memverifikasi sumber, memastikan sebuah informasi atas kebenarannya dan mengkritisi sebuah kebijakan, terlebih dari instansi yang menjadi wadah, penulis bisa menggali informasi penting yang tidak banyak orang tahu. Selain itu dalam proses Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) juga dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif.

Selama proses Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) berlangsung Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan, pikiran dan kompetensi dalam bidang administrasi, komunikasi dan koordinasi, yang di mana hal ini sangat penting dalam meningkatkan kemampuan penulis untuk bekerja sama dalam tim dan berinteraksi dengan berbagai *stakeholder*. Melalui kegiatan ini diharapkan penulis dapat membangun jaringan dan relasi dengan sesama mahasiswa, staf dan anggota Dewan dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang sangat penting dalam meningkatkan kesempatan karir dan memperluas jaringan profesional.

Proses kegiatan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) telah berlangsung selama 8 (delapan) minggu dan setiap kegiatan yang telah dilakukan penulis telah disusun dalam laporan ini.

B. Maksud dan Tujuan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM)

1. Melalui kegiatan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) mahasiswa memperluas pengetahuan tentang politik dan pengelolaan lembaga legislatif, mahasiswa juga dapat memahami proses legislasi, pengawasan dan peran diplomasi parlemen secara langsung.
2. Menumbuhkan sikap profesionalisme mahasiswa dalam praktik profesi dan bidang pekerjaan yang sebenarnya.
3. Membantu mahasiswa siap menghadapi kompleksitas dunia kerja serta mengaplikasikan keterampilan dan nilai-nilai yang dikuasai dalam filsafat ke dalam konteks jurnalis dan pengelolaan lembaga.
4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membangun jaringan dan koneksi dengan profesional, praktisi dan ahli.
5. Mahasiswa dapat memahami bagaimana menjaga integritas dan keimbangan dalam pemberitaan dan pengelolaan lembaga serta menerapkan nilai-nilai etis yang dikuasai dalam filsafat.

Tujuan diadakannya program Praktik Profesi Mahasiswa ialah:

1. Meningkatkan kemampuan dan pengalaman mahasiswa dalam bidang yang ditekuni.
2. Melatih pemikiran kritis dan solutif dalam menghadapi permasalahan yang ada di dunia kerja.
3. Membangun jaringan yang luas dalam pengembangan karir dan memperluas jaringan profesional.

C. Kegunaan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM)

Dalam Program Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) manfaat dan kegunaan yang baik untuk mahasiswa, STAI SADRA, dan Instansi ialah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

a. Menjadi salah satu syarat untuk kelulusan mata kuliah PPM Akidah dan Filsafat Islam di STAI SADRA.
b. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerja sama tim dalam lingkungan kerja.
c. Mahasiswa dapat mempraktikkan pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi yang sangat relevan yang terjadi dilembaga.
d. Memperluas pengetahuan dan informasi secara langsung dari lembaga.
e. Membantu mahasiswa memahami jabatan-jabatan pekerjaan dan kerangka karir alumni ke depan, sehingga mahasiswa dapat memilih karir yang tepat.
f. Membangun jaringan dengan para profesional dan juga sesama mahasiswa magang lainnya.
g. Melatih mahasiswa agar memiliki jiwa disiplin, bertanggung jawab dan berpikiran maju.

2. Bagi STAI SADRA

a. Pengembangan perkuliahan dan dunia kerja antara sasaran program studi dan kebutuhan lapangan kerja.
b. Memungkinkan kampus untuk membangun perluasan kerja sama dengan instansi.

c. Kampus dapat mengembangkan keterampilan mahasiswa dan memotivasi mahasiswa.
d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi yang ada di STAI SADRA serta belajar di luar kampus. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga mahasiswa lebih siap untuk bekerja setelah lulus dari perguruan tinggi.

3. Bagi Instansi

a. Melatih dan mengembangkan keterampilan mahasiswa.

b. Mahasiswa membawa perspektif baru yang dapat meningkatkan inovasi.
c. Membantu membagi beban kerja, meningkatkan efisiensi.
d. Membangun koneksi dengan institusi pendidikan dan calon profesional.
e. Memungkinkan evaluasi kinerja mahasiswa untuk perekrutan.
f. Meningkatkan reputasi sebagai pendukung pengembangan profesional.

D. Tempat PPM

Kegiatan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) yang dilaksanakan oleh penulis bertempat di Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (F-PAN DPR RI) yang merupakan Badan Legislatif Nasional Indonesia Negara yang merupakan lembaga hukum yang menjadi perwakilan rakyat.

Nama Instansi	: Fraksi PAN DPR RI
Alamat	: Jl. Jendral Gatot No.1, RT.1/RW.3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10270
No. Telepon	: 021-571 5349
Fax	: 021-571 5423

Website	: https://www.dpr.go.id
Instagram	: DPR RI (@dpr_ri) • Foto dan video Instagram
Youtube	: DPR RI - SERBA SERBI PARLEMEN - FUNGSI DAN WEWENANGAN DPR RI (youtube.com)

E. Waktu dan prosedur Pelaksanaan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM)

1. Tahap Persiapan

Kegiatan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) di awali dengan proses pengajuan surat permohonan izin Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) yang keluar pada tanggal 16 Mei 2024, sebelumnya penulis telah berkomunikasi dengan Ibu Annisa Zakiah Psb,S.Sos selaku Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang berperan sebagai nara hubung yang mengantarkan penulis dan rekan untuk menemui Tenaga Ahli (TA) yang menerima mahasiswa magang di Sekretariat Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang terletak di Nusantara I gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) lantai 20. Konfirmasi diterima langsung di tanggal 17 Mei 2024 dan penulis diminta untuk menyerahkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) beserta foto formal 2X2 untuk mengurus pembuatan *identity card* sebagai kartu akses masuk ke dalam kawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Tanggal 26 Juni 2024 penulis datang untuk mengurus proses pembuatan *identity card* dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan tersebut. Ditanggal yang sama pihak Sekretariat sedang mengadakan diskusi publik Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) “Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang Kepada Ormas Keagamaan” di Ruang Rapat Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam kunjungan ini penulis berpartisipasi membantu staf untuk menjadi panitia kegiatan diskusi. Setalah kunjungan ini penulis menunggu jadwal

yang telah ditetapkan oleh kampus untuk memulai kegiatan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM).

Sambil menunggu jadwal masuk kegiatan penulis sudah bergabung ke grup *whatsapp* untuk menunggu informasi yang sering di berikan oleh pembimbing magang. Di tanggal 04 Juli 2024 penulis datang berkunjung lagi untuk menghadiri Rapat Paripurna namun karena penulis belum mempunyai *identity card*, penulis belum bisa masuk dan mengikuti kegiatan. Di tanggal itu penulis hanya datang untuk mengambil surat permohonan pembuatan *identity card* dan langsung memberikannya ke PAMDAL yang khusus bertugas membuat *identity card* mahasiswa magang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan juga penulis sempat mengunjungi Museum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama mahasiswa magang dari kampus lainnya.

2. Tahap pelaksanaan kegiatan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM)

Pelaksanaan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) dimulai mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh kampus yakni tanggal 08 Juli 2024. Pelaksaan kegiatan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diawali dengan pengenalan lingkungan sekitar oleh pembimbing Magang yang dilaksanakan di ruang sidang Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan penjelasan apa saja yang harus diamati selama proses kegiatan Praktik Profesi Magang (PPM) berlangsung.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara tatap muka di kawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Waktu pelaksanaan terhitung dari tanggal 08 Juli 2024 sampai tanggal 27 Agustus 2024. Pelaksanaan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) ini terhitung selama 8 (delapan Minggu) dengan hari aktif kerja selama 4 (empat) hari, dengan jam kerja yang bersifat *flexible* bisa mulai dari jam kerja 09:00 WIB sampai waktu 16:00 WIB. Dalam pelaksanaannya penulis bergabung sebagai pengamat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Di akhir kegiatan penulis masih harus melaksanakan kewajiban presentasi di tempat Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) sebagai syarat

untuk mendapatkan nilai Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) dan juga sertifikat sebagai bukti bahwa pernah melakukan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) dan presentasi tersebut dilakukan pada tanggal 04 September 2024 dengan dihadiri oleh pembimbing magang , dosen pembimbing dari kampus serta para teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan magang dari kampus masing-masing.

3. Tahap Penulisan Laporan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM)

Penyusunan laporan kegiatan Praktik Profesi Mahasiswa dimulai sejak tanggal 01 Agustus 2024. Penyusunan laporan dicicil sejak tidak ada kegiatan yang berlangsung dan dilakukan di ruang sidang Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang dimulai dari pembuatan laporan kegiatan harian dan juga laporan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM).

BAB II

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah dan *Profile* Lembaga

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi sebagai wakil rakyat di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga memiliki tiga fungsi utama yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki tiga periode pembentukan utama, di awali pada masa jajahan Belanda, terdapat semacam parlemen yang dibentuk oleh penjajah Belanda dinamakan *Volksraad* (Dewan Rakyat). Terbentuknya parlemen pada masa jajahan Belanda ini merupakan dampak gerakan nasional yang berpengaruh atas perubahan yang terjadi dengan selesainya perang dunia I (1914-1918). *Volksraad* (Dewan Rakyat) memiliki kekuasaan legislatif di Hindia Belanda, sekaligus menjadi lembaga perwakilan rakyat bagi pemerintahan Hindia-Belanda. Parlemen ini dibentuk tanggal 16 Desember 1916, namun pembentukan ini baru terlaksana di tahun 1918 pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Mr. Graaf van Limburg Stirum yang sekaligus menjadi penasihat kepada Gubernur Jenderal daripada menyuarakan kehendak masyarakat, namun dengan adanya lembaga ini menunjukkan bahwa pentingnya lembaga perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan.

Belanda mengakhiri masa penjajahannya pada tanggal 8 Maret 1942 yang telah berlangsung selama 350 Tahun. Namun penjajahan tidak langsung berakhir, penjajahan di lanjutkan oleh bangsa Jepang yang secara langsung mengakhiri keberadaan *Volksraad* (Dewan Rakyat) dan otomatis keberadaannya tidak diakui lagi hingga tiba pada masa bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan Kemerdekaan yang menjadi masa periode kedua.

Dalam periode ketiga sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dimulai sejak terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tepat 12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian yang terletak di Pasar Baru, Jakarta dan pada tanggal

tersebut diperingati menjadi hari lahir Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Komite ini menjadi cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) memiliki anggota sebanyak 60 orang namun dalam beberapa sumber lain dikatakan ada 103 anggota di dalamnya. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) bertugas sebagai MPR telah melakukan sidang sebanyak 6 kali dan juga telah berhasil menyetujui 133 RUU di samping pengajuan mosi, resolusi, usul dll. berikut beberapa masa periode yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hingga saat ini:

Tabel 2. 1 Masa Periode DPR RI

No.	Nama	Periode
1.	Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)	29 Agustus 1945-15 Februari 1950
2.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan senat Republik Indonesia Serikat (RIS)	15 February 1950-16 Agustus 1950
3.	Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)	16 Agustus 1950-26 Maret 1956
4.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu pertama	26 Maret 1956-22 Juli 1959
5.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah Dekrit Presiden	22 Juli 1959-26 Juni 1960
6.	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR)	26 Juni 1960-15 November 1965
7.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) GR minus Partai Komunis Indonesia (PKI)	15 November1965-19 November 1966
8.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) GR Orde Baru	19 November 1966-28 Oktober 1971
9.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu ke-2	28 Oktober 1971-1 Oktober 1977
10.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu ke-3	1 Oktober 1977-1 Oktober 1982
11.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu ke-4	1 Oktober 1982-1 Oktober 1987
12.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu ke-5	1 Oktober 1987-1 Oktober 1992

13.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu ke-6	1 Oktober 1992-1 Oktober 1997
14.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu ke-7	1 Oktober 1997-1 Oktober 1999
15.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu ke-8	1 Oktober 1999-1 Oktober 2004
16.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu ke-9	1 Oktober 2004-1 Oktober 2009
17.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu ke-10	1 Oktober 2009-1 Oktober 2014
18.	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilu ke-11	1 Oktober 2014-I Oktober 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di dalamnya juga terdapat lembaga yang mendukung dalam proses terselenggaranya rancangan undang-undang dan juga sebagai penyalur aspirasi rakyat, yaitu komisi dan fraksi, dengan adanya peran komisi dan fraksi yang membantu dalam terlaksananya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

KOMISI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki alat kelengkapan lainnya yaitu komisi yang bersifat tetap dan jumlahnya ditetapkan pada masa permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan permulaan Tahun Sidang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2019-2024 menetapkan sebanyak 11 (sebelas) Komisi yang telah diputuskan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di tanggal 27 Oktober 2019.

Tugas utama dari komisi dalam pembentukan undang-undang ialah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan rancangan undang-undang. Dari 11 (sebelas) Komisi tersebut dibagi untuk ruang lingkup tugas yang spesifik. Ruang lingkup tersebut terbagi menjadi:

1. **Komisi I** : Pertahanan, Luar Negeri, komunikasi dan Informatika, intelijen.

a. Kementerian Pertahanan (Kemhan)
b. Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
c. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
d. Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU
e. Badan Intelijen Negara (BIN)
f. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
g. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
h. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
i. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
j. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
k. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
l. Dewan Per;
m. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
n. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)
o. Lembaga Sensor Film (LSF) dan
p. Perum LKBN Antara9

2. **Komisi II :** Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertahanan dan Reforma Agraria.

a. Kementerian Dalam Negeri RI
b. Kementerian Sekretariat Negara RI
c. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI
d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
e. Sekretaris Kabinet RI
f. Kantor Staf Presiden (KSP)
g. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
h. Badan Pengawas Pemilu RI (BAWASLU
i. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
j. Badan Kepegawaian Negara (BKN)

k. Lembaga Administrasi Negara (LAN
l. Ombudsman RI (ORI)
m. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
n. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
o. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
p. Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP)
q. Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN)

3. **Komisi III :** Hukum, HAM, Keamanan
   a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
   b. Kejaksaan Agung
   c. Kepolisian Negara Republik Indonesia
   d. Komisi Pemberantasan Korupsi
   e. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
   f. Mahkamah Agung
   g. Mahkamah Konstitusi
   h. Komisi Yudisial
   i. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
   j. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
   k. Badan Narkotika Nasional
   l. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
   m. Setjen MPR
   n. Setjen DPD
4. **Komisi IV :** Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kelautan
   a. Kementerian Pertanian
   b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
   c. Kementerian Kelautan dan Perikanan
   d. Perum Bulog
   e. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dan
   f. Badan Pangan Nasional (27 September 2022)
5. **Komisi** V : Infrastruktur, Transportasi, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Pencarian dan Pertolongan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
   a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
   b. Kementerian Perhubungan

c. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
d. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
e. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

6. **Komisi VI :** Perdagangan, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi Nasional.
   a. Kementerian Perdagangan;
   b. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah
   c. Kementerian BUMN, termasuk seluruh BUMN
   d. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
   e. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
   d. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
   e. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
   f. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
   g. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN dan
   h. Dewan Koperasi Indonesia
7. **Komisi VII :** Energi, Riset dan Industri
   a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
   b. Kementerian Perindustrian
   c. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
   d. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
   e. Dewan Energi Nasional (DEN)
   f. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
   g. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
   h. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
   i. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
   j. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
   k. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
   l. Badan Informasi Geospasial (BIG)
   m. Lembaga Eijkman Pusat
   n. Pusat Peragaan IPTEK

8. **Komisi VIII** : Agama, Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
    a. Kementerian Agama
    b. Kementerian Sosial
    c. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    d. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
    e. Badan Amil Zakat Nasional
    f. Badan Wakaf Indonesia
    g. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
    h. Badan Pengelola Keuangan Haji
9. **Komisi IX** : Kesehatan, Ketenagaraan, Kependudukan
    a. Kementerian Kesehatan
    b. Kementerian Ketenagakerjaan
    c. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
    d. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)
    e. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
    f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
    g. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
10. **Komisi X** : Pendidikan, Riset, Olahraga dan Kepariwisataan
    a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
    b. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
    c. Kementerian Pemuda dan Olahraga
    d. Perpustakaan Nasional
11. **Komisi XI** : Badan Anggaran, dan Badan Akuntabillitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, tanggal 30 September 2021
    a. Kementerian Keuangan
    b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/(BAPPENAS)
    c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

d. Badan Pusat Statistik (BPS)
e. Sekretariat Jenderal BPK
f. Bank Indonesia (BI)
g. Perbankan
h. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
i. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)
j. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
k. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
l. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
m. BUMN (Privatisasi)

Komisi juga merupakan unit kerja utama yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) substansinya dikerjakan dalam Komisi. Keputusan dan kesimpulan hasil rapat kerja Komisi atau rapat kerja gabungan Komisi bersifat mengikat antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah. Komisi juga bertugas dalam menindaklanjuti penugasan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai usulan anggota yang berkaitan dengan aspirasi dari daerah pemilihan dan tugas pengawasan lainnya yang telah diputuskan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada masa akhir keanggotaannya Komisi bertanggung jawab untuk membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya, Komisi juga bertugas dalam menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang ditindak lanjuti kepada Badan Urusan Rumah Tangga.[1]

FRAKSI

[1] Setjen DPR RI, "Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat," accessed September 3, 2024, https://www.dpr.go.id/akd/komisi.

Fraksi dibentuk untuk menselaraskan kepentingan Anggota Dewan yang sangat beragam. Keterhubungan antara Fraksi dan Komisi ialah kerja sama dalam legislasi. Fraksi berperan dalam proses pembuatan undang-undang sedangkan Komisi melakukan analisis dan evaluasi terhadap rancangan undang-undang tersebut. Komisi dapat mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Fraksi untuk mendapatkan masukan dan persetujuan sebelum rancangan undang-undang disetujui.

2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memilik peran penting dalam proses legislasi di Indonesia. Dengan mengemban tanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan dapat mencerminkan aspirasi masyarakat dan memenuhi kebutuhan hukum yang sedang berlaku, berikut penjelasan fungsi, tugas dan wewenang Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

a. Fungsi Legislasi

1. Kekuasaan untuk menyusun dan menetapkan undang-undang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang merupakan salah satu dari tiga fungsi utama selain fungsi pengawasan dan anggaran.
2. Hak dalam mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) bagian dari hak inisiatif yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selain Presiden.

b. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

1. Mengadakan pembahasan terhadap RUU yang diajukan dan melakukan pengesahan untuk kemudian diundangkan.
2. Melakukan penyusunan RUU yang diusulkan baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sendiri, Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
3. Bertugas dalam menyusun dan menetapkan program Legislasi Nasional (Proglenas) yang mengatur prioritas pembentukan undang-undang.

c. Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

1. Berwenang dalam menentukan prosedur dan tahapan dalam pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2011.
2. Dapat mengajukan RUU baik sebagai inisiatif sendiri maupun dalam kerja sama dengan presiden atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
3. Pengesahan bersama untuk RUU yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) harus ditandatangani oleh Presiden dalam waktu yang telah ditentukan.[2]

3. Ruang lingkup Praktik Profesi Mahasiswa (PPM)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga legislasi pusat yang gedungnya tergabung dengan lembaga besar lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak serta merta berdiri sendiri melainkan lembaga yang berdiri dan membantunya meliputi Komisi dan Fraksi.

Pada kegiatan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) penulis mendapatkan lembaga yang andilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) cukup penting yaitu Fraksi. Pengelompokan anggota yang terdiri dari kekuatan sosial politik, oleh karenanya Fraksi bertugas untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta hak dan kewajibannya. Tugas fraksi antara lain mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja Anggota Dewan. Fraksi juga memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik.

---

[2] Norisman Tumuhu, "FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA INDONESIA (DPR-RI)," *LEX ADMINISTRATUM* 1, no. 2 (November 9, 2013), accessed September 3, 2024, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/3029.

Terdapat 9 (sembilan) Fraksi pada periode 2019-2024 yaitu:

Tabel 2. 2 Fraksi yang ada di DPR RI

No.	Nama Fraksi	Singkatan	Jumlah Anggota	Persentase
1	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	FPDIP	128	22,26
2	Fraksi Partai Golongan Karya	FPG	85	14,78
3	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	FGERINDRA	78	13,57
4	Fraksi Partai Nasdem	FNASDEM	59	10,26
5	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	FPKB	58	10,09
6	Fraksi Partai Demokrat	FPD	54	9,39
7	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	FPKS	50	8,70
8	Fraksi Partai Amanat Nasional	FPAN	44	7,65
9	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	FPPP	19	3,30
TOTAL			575	100,0

B. Deskripsi Khusus

1. Sejarah pembentukan Fraksi

a. Era Kemerdekaan (1945-1949)

Dibentuk Fraksi dengan tujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

b. Era Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

Struktur Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masih berkembang dan tetap berfungsi sebagai wadah berhimpun anggota 1Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR

RI) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan ke publik.

c. Era Orde Baru (1970-an hingga 1990-an)

Pada masa ini Fraksi dipengaruhi oleh kekuatan politik dan dominan. Partai Golkar yang mendominasi pemerintahan memiliki peran besar dalam pembentukan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

d. Era Reformasi (1998 hingga sekarang)

Saat era ini terjadi perubahan signifikan dalam struktur dan fungsi fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Partai-partai politik yang berbeda mulai memiliki fraksi masing-masing sehingga meningkatkan representasi masyarakat dan diversitas politik di parlemen.[3]

2. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)

Terdapat beberapa periode penting dalam sejarah kemunculan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Tahun 1998 sebagai hasil perubahan politik yang terjadi di Indonesia setelah Reformasi menjadi tahu8n pendirian Partai Amanat Nasional. Partai ini dulunya berasal dari Gerakan Taruna Muslimin (GTM) yang kemudian bergabung dengan Partai Keadilan (PK) dan kemudian bergabung menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). Saat Era Reformasi Partai Amanat Nasional (PAN) mulai berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif dan presiden sehingga pada pemilihan umum 1999 Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan 7,3% suara dan berhasil memenangkan 12 kursi di Dewan Perwakilan rakyat republik Indonesia (DPR RI).

Pada masa Orde Baru Amien Rais dan 49 rekannya dalam Majelis Amanat Rakyat (MARA) bertekad untuk melanjutkan perjuangan reformasi setelah rezim Orde Baru berakhir. Proses pembentukan Partai Amanat Nasional dimulai pada 5-7 Juli 1998 dalam Tanwir

[3] "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia – Kompaspedia," accessed September 3, 2024, https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia.

Muhammadiyah di Semarang.[4] Pendiri Partai Amanat Nasional terdiri dari Amien Rais, Faisal Basri MA, Ir.M.Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr.Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof.Dr.Emil Salim, A.M. Fatwa, Zoemrotin dan Alvin Lie Ling Piao. Deklarasi resmi dilakukan di hadapan ribuan massa pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan, Jakarta. Pembentukan Partai Amanat Nasional berdasarkan pengesahan dari Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 pada tanggal 27 Agustus 2003.[5]

DAFTAR PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI)

Tabel 2. 3 Daftar Pimpinan Fraksi PAN

No.	Nama	No. Anggota	Jabatan
1.	Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA	A-480	Ketua
2.	Ir. H. Ahmad Rizki Sadig, M.Si	A-505	Wakil Ketua
3.	H. A. Bakri HM, SE	A-486	Wakil Ketua
4.	Ir. H. Achmad Hafisz Tohir	A-487	Wakil Ketua
5.	H. Boyman Harun, SH	A-513	Wakil Ketua
6.	Eko Hendro Purnomo, S.Sos	A-493	Sekretaris
7.	Daeng Muhammad, SE., M.Si	A-500	Wakil Sekretaris
8.	Hj. Dewi Coryati, M.Si	A-489	Wakil Sekretaris
9.	Mitra Fakhruddin MB	A-518	Wakil Sekretaris
10.	H. MHD. Asli Chaidir, SH	A-483	Wakil Sekretaris
11.	Pangeran Khairul Saleh	A-514	Wakil Sekretaris
12.	Athari Ghauthi Ardi	A-482	Bendahara

[4] "Sejarah Partai PAN, Prinsip Dasar, Dan Nomor Urut Pemilu 2024," accessed September 3, 2024, https://tirto.id/sejarah-partai-pan-prinsip-dasar-dan-nomor-urut-pemilu-2024-gCVT.

[5] Fajriudin Muttaqin dkk, *SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL* (Humaniora, 2015).

13.	Hj. Intan Fauzi, SH., LLM	A-499	Wakil Bendahara
14.	Abdul Hakim Bafagih	A-506	Wakil Bendahara
15.	Haerudin, S.Ag., MH	A-502	Wakil Bendahara

3. Visi dan Misi Partai Amanat Nasional (PAN)

a. Visi

Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa

b. Misi

1. Mewujudkan kader yang berkualitas.
2. Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat.
3. Mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur.
4. Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat.
5. Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

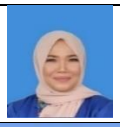
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional.[6]

4. Struktur Anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)

Tabel 2. 4 Struktur anggota DPR RI dari Fraksi PAN

No Anggota	Gambar	Nama/Fraksi/Dapil	AKD/JABATAN
478		H. NAZARUDDIN DEK GAM Fraksi Partai Amanat Nasional ACEH I	(Komisi III - Anggota)
479		MULFACHRI HARAHAP, S.H., M.H. Fraksi Partai Amanat Nasional SUMATERA UTARA I	(Komisi III - Anggota)
480		Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, M.A. Fraksi Partai Amanat Nasional SUMATERA UTARA II	(Komisi IX - Anggota)
481		NASRIL BAHAR, S.E. Fraksi Partai Amanat Nasional SUMATERA UTARA III	(Panitia Khusus - Anggota)
482		ATHARI GAUTHI ARDI Fraksi Partai Amanat Nasional SUMATERA BARAT I	(Komisi V - Anggota)
483		H. MHD ASLI CHAIDIR, S.H. Fraksi Partai Amanat Nasional SUMATERA BARAT I	(Komisi VIII - Anggota)
484		Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si. Fraksi Partai Amanat Nasional SUMATERA BARAT II	(Badan Legislasi - Anggota)
485		Dr. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A. Fraksi Partai Amanat Nasional RIAU I	(Panitia Khusus - Anggota)
486		H. A. BAKRI HM., S.E. Fraksi Partai Amanat Nasional JAMBI	(Panitia Khusus - Anggota)

[6] "Partai Amanat Nasional (PAN)," *Tribunnewswiki.com*, accessed September 3, 2024, https://www.tribunnewswiki.com/2019/08/23/partai-amanat-nasional-pan.

487		Ir. H. ACHMAD HAFISZ TOHIR Fraksi Partai Amanat Nasional SUMATERA SELATAN I	(Komisi XI - Anggota)
488		HANNA GAYATRI, S.H. Fraksi Partai Amanat Nasional SUMATERA SELATAN II	(Komisi V - Anggota)
489		Hj. DEWI CORYATI, M.Si. Fraksi Partai Amanat Nasional BENGKULU	(Komisi X - Kapoksi)
490		KHAIRUL MUHTAR, S.E., M.M. Fraksi Partai Amanat Nasional LAMPUNG I	(Komisi II - Anggota)
491		Ir. ALIMIN ABDULLAH Fraksi Partai Amanat Nasional LAMPUNG II	(Panitia Khusus - Anggota)
492		Dr. H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si. Fraksi Partai Amanat Nasional KEPULAUAN RIAU	(Komisi VII - Anggota)
493		EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos Fraksi Partai Amanat Nasional DKI JAKARTA I	(Komisi VI - Anggota)
494		DIAN ISTIQOMAH, S.Kep Fraksi Partai Amanat Nasional DKI JAKARTA III	(Komisi IX - Anggota)
495		AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E., M.H Fraksi Partai Amanat Nasional JAWA BARAT II	(BAKN - Kapoksi)
496		H. EDDY SOEPARNO Fraksi Partai Amanat Nasional JAWA BARAT III	(Komisi VII - Wakil Ketua)
497		DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi Fraksi Partai Amanat Nasional JAWA BARAT IV	(Komisi X - Anggota)
498		PRIMUS YUSTISIO, S.E., M.A.P Fraksi Partai Amanat Nasional JAWA BARAT V	(Panitia Khusus - Anggota)

499		Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M. Fraksi Partai Amanat Nasional JAWA BARAT VI	(Badan Legislasi - Anggota)
500		DAENG MUHAMMAD, S.E, M.Si. Fraksi Partai Amanat Nasional JAWA BARAT VII	(Panitia Khusus - Anggota)
501		FARAH PUTERI NAHLIA, B.A, M.Sc. Fraksi Partai Amanat Nasional JAWA BARAT IX	(Komisi I - Anggota)
502		HAERUDIN, S.Ag, M.H. Fraksi Partai Amanat Nasional JAWA BARAT XI	(Komisi IV - Anggota)
503		Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN Fraksi Partai Amanat Nasional D.I. YOGYAKARTA	(Komisi II - Anggota)
504		H. SUNGKONO Fraksi Partai Amanat Nasional JAWA TIMUR I	(Panitia Khusus - Anggota)
505		Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.SI Fraksi Partai Amanat Nasional JAWA TIMUR VI	(Badan Musyawarah - Anggota)
506		ABDUL HAKIM BAFAGIH Fraksi Partai Amanat Nasional JAWA TIMUR VIII	(Komisi VI - Kapoksi)
508		SLAMET ARIYADI, S.Psi. Fraksi Partai Amanat Nasional JAWA TIMUR XI	(Panitia Khusus - Anggota)
509		H. YANDRI SUSANTO, S.Pt Fraksi Partai Amanat Nasional BANTEN II	(Badan Legislasi - Anggota)
510		H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si. Fraksi Partai Amanat Nasional BANTEN III	(Komisi IX - Anggota)

511		Dr. H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M Fraksi Partai Amanat Nasional NUSA TENGGARA BARAT I	(Komisi IV - Kapoksi)
512		AHMAD YOHAN, M.Si Fraksi Partai Amanat Nasional NUSA TENGGARA TIMUR I	(Badan Musyawarah - Anggota)
513		BOYMAN HARUN, S.H Fraksi Partai Amanat Nasional KALIMANTAN BARAT I	(Komisi V - Anggota)
514		Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M. Fraksi Partai Amanat Nasional KALIMANTAN SELATAN I	(Komisi III - Wakil Ketua)
515		Dr. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H. Fraksi Partai Amanat Nasional SULAWESI TENGAH	(Komisi III - Kapoksi)
516		Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag. Fraksi Partai Amanat Nasional SULAWESI SELATAN I	(Panitia Khusus - Anggota)
517		Dr. Hj. ANDI YULIANI PARIS Fraksi Partai Amanat Nasional SULAWESI SELATAN II	(Komisi VII - Anggota)
518		MITRA FAKHRUDDIN MB, SP. Fraksi Partai Amanat Nasional SULAWESI SELATAN III	(Komisi X - Anggota)
519		FACHRY PAHLEVI KONGGOASA, S.E. Fraksi Partai Amanat Nasional SULAWESI TENGGARA	(Panitia Khusus - Anggota)
520		PAULUS UBRUANGGE Fraksi Partai Amanat Nasional PAPUA	(Komisi II - Anggota)

BAB III

PELAKSANAAN

A. Kedudukan

Saat pelaksanaan kegiatan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) penulis bertugas sebagai pengamat dan pelapor. Melalui kegiatan ini penulis dapat menghadiri rapat dan menjadi pengamat dalam proses legislasi, pengawasan dan penganggaran. Penulis secara langsung melihat situasi yang terjadi dan bagaimana proses undang-undang dibuat, disusun dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Saat menghadiri rapat penulis harus mengumpulkan data yang relevan. Penulis juga harus memperhatikan agenda rapat dan selalu peka terhadap isu yang sedang marak dibicarakan serta memerhatikan agenda rapat, catatan rapat dan isu-isu yang sedang dibahas, yang bertujuan untuk digunakan untuk membuat laporan pelaksanaan yang akurat dan detail.

Melalui proses tersebut penulis berpotensi untuk meningkatkan pengetahuan tentang politik dan legislasi dan juga penulis dapat memahami bagaimana proses legislasi berlangsung, peran fraksi dan komisi dalam proses legislasi serta bagaimana pengawasan terhadap pemerintahan dilakukan. Selama proses pelaksanaan dilakukan penulis juga membangun jaringan koneksi dengan dewan, staf, wartawan dan berbagai s*takeholder* dan hal ini menjadi penting untuk pengembangan karir dan memperluas jaringan profesional penulis.

B. Bidang Kerja

1. Pengamat

Penulis bertugas mengamati dan mencatat proses pembuatan undang-undang yang termasuk dalam pembahasan, pengujian dan pengesahan RUU, mengidentifikasi langkah-langkah penting dalam proses legislasi dan bagaimana fraksi-fraksi berinteraksi untuk mencapai kesepakatan. Penulis juga menganalisis kebijakan yang sedang dibahas dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia (DPR RI) termasuk dampak potensial terhadap masyarakat. Penulis mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk memberikan analisis yang mendalam

tentang isu-isu yang dihadapi. Selain itu penulis juga memantau diskusi dan debat yang berlangsung dalam rapat termasuk pendapat dari berbagai fraksi. Mencari pemahaman tentang isu-isu yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia (DPR RI) dan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan termasuk dokumen resmi, berita dan publikasi akademis untuk dikumpulkan menjadi laporan nantinya. Dan juga mengikuti pelatihan atau seminar yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia (DPR RI) atau lembaga terkait untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penulis.

2. Pelapor (Jurnalis)

Penulis bertugas meliput dan mencatat jalannya rapat-rapat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) termasuk Rapat Paripurna, Komisi dan Badan lalu mengambil catatan detail tentang isu yang dibahas, pendapat fraksi dan keputusan yang di hasilkan dari rapat tersebut. Hasil dari liputan dan catatan ini yang akan disusun dalam bentuk laporan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan.

C. Pelaksanaan kegiatan

1. Rapat Paripurna

Melalui rapat paripurna penulis dapat memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang proses legislasi, pengawasan dan penganggaran di Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia (DPR RI) dan melihat secara langsung bagaimana undang-undang dibuat dan disahkan secara langsung.

Rapat paripurna ialah kegiatan yang menjadi tempat rancangan undang-undang dibahas dan diambil keputusannya. Rancangan undang-undang yang akan dipresentasikan oleh Komisi yang terkait dan dibahas oleh semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di dalam rapat paripurna juga digunakan untuk melakukan interpelasi dan angket terhadap pemerintah. Para anggota dapat meminta keterangan dari menteri atau pejabat lainnya tentang pelaksanaan kebijakan

pemerintah. Dalam Rapat Paripurna juga dibahas anggaran pemerintah termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Selama Rapat Paripurna berlangsung Fraksi-fraksi dapat menyampaikan pendapat mereka tentang berbagai isu, hal ini menjadi kesempatan bagi fraksi untuk mempengaruhi proses legislasi dan keputusan yang diambil. Setelah semua isu dibahas dan dipertimbangkan Rapat Paripurna akan mengambil keputusan final tentang rancangan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah dan penganggaran.



Gambar 3. 1 **Prosesi Sidang Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V**

Rapat Paripurna yang dihadiri penulis ialah Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota; Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap 27 (dua puluh tujuh) RUU Usul Inisiatif Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tentang Kabupaten/Kota dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ; Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU

Usul inisiatif Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ; Laporan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) atas hasil pembahasan mengenai penerimaan Hibah Alpahankam dari dan ke Luar Negeri, dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan; Penetapan Mitra Kerja Badan Karantina Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan; Keterangan Pengusul Hak Angket tentang Pengawasan Haji; Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Usul Hak Angket tentang Pengawasan Haji, dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan; Penetapan Pembentukan dan Keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji, dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan; Penyampaian Laporan Badan Anggaran ats Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan RKP Tahun 2025; Pandangan Fraksi-Fraksi ats Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2023.



Gambar 3. 2 ***Rapat Paripurna ke-22 Penutupan Masa Persidangan V Tahun sidang 2023-2024***

Di agenda selanjutnya di tanggal 11 Juli 2024 penulis ikut menghadiri Rapat Paripurna ke-22 Penutupan Masa Persidangan V Tahun sidang 2023-2024. Rapat ini membahas tentang 1. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif Badan Legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR

RI) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI; 2. Pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ada Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berisi tentang Evaluasi terhadap pencapaian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam merumuskan dan membahas berbagai RUU, termasuk RUU yang telah dibahas dalam rapat ini. Lalu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga memberikan penghargaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pihak-pihak yang berkontribusi dalam proses legislasi, harapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk masa sidang berikutnya termasuk tantangan yang akan dihadapi dan pentingnya kolaborasi antar fraksi ke depannya dan juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk terus bekerja demi kepentingan masyarakat dan negara.

Etika dan tanggung jawab Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Rapat Paripurna ialah bagaimana kepatuhan Anggota terhadap tata tertib sidang yang telah ditetapkan yaitu mengenai waktu berbicara, urutan pembicara dan prosedur pengambilan keputusan. Ketidakpatuhan Anggota dapat mengganggu jalannya rapat yang dapat merugikan proses legislasi berlangsung. Rapat ini dilakukan untuk kepentingan publik maka setiap keputusan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, Anggota diharapkan untuk mengedepankan suara konstituen mereka dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu hal ini mencakup tanggung jawab untuk memahami dampak kebijakan terhadap masyarakat luas sebelum mengambil keputusan.

Selama di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), penulis akan terlibat dalam memantau berbagai rapat paripurna dan

mendalami isu-isu penting yang dibahas. Fokus utama kegiatan ini adalah mencatat dan menganalisis dampak dari undang-undang dan keputusan yang diambil terhadap masyarakat, ekosistem, dan keuangan negara. Setiap kegiatan akan diakhiri dengan penyusunan laporan yang mempertimbangkan aspek etis, keadilan, dan keberlanjutan, serta keterkaitan antara kebijakan dan kehidupan masyarakat.

2. Rapat Panitia Kerja (Panja) Balai legislatif (Baleg)

Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) merupakan sebuah pertemuan yang diadakan langsung oleh Badan Legislasi (Baleg) di Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia (DPR RI), rapat ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek terkait proses legislasi, termasuk pengajuan, pembahasan dan penetapan RUU. Rapat ini bertujuan untuk mengkaji dan mendiskusikan rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia (DPR RI), Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) ini sangat penting dalam memastikan bahwa proses pembuatan Undang-Undang berjalan transparan, *akuntabel* dan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak.



Gambar 3. 3 ***Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah dan DPD RI***

Pokok Bahasan Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan

pemerintah dan DPD RI penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU RUU Pilkada. Ialah Penetapan Perppu yang membahas urgensi dan kebutuhan untuk mengubah UU No.1 Tahun 2014 terutama terkait mekanisme dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal ini menerima pendapat dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah mengenai isu-isu yang perlu diperhatikan dalam RUU Pilkada.

Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan rapat merevisi UU Pilkada dengan tujuan membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan syarat pencalonan kepada daerah. Wakil Ketua Baleg, Achmad Baidowi, menyatakan bahwa rapat ini akan membahas putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) mengenai ambang batas pencalonan dalam Pilkada serentak 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengabulkan sebagian permohonan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan rician ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota). Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Shartoyo yang membacakan Amar putusan menjelaskan bahwa Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan dari Partai Buruh dan Partai Gelora. Keputusan tersebut mencakup ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk hingga 2.000.000 jiwa partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah minimal 10%.
2. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 hingga 6.000.000 jiwa, ambang batasnya adalah 8,5%.
3. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 jiwa hingga 12.000.000 jiwa, ambang batas ditetapkan sebesar 7,5%.

4. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh minimal 6,5% suara sah.

Etika dan tanggung jawab yang harus diterapkan oleh Anggota rapat ialah Anggota harus mengikuti tata tertib yang berlaku dalam rapat yaitu mencakup pengaturan waktu berbicara, urutan agenda dan prosedur pengambilan suara, ketidakpatuhan terhadap tata tertib tersebut berpengaruh terhadap jalannya proses diskusi dan menghambat pengambilan keputusan yang efektif. Menghargai pendapat dan perspektif lain karena dalam rapat Panitia Kerja (Panja) melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintahan dan Dewan Perwakilan Derah (DPD) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) harus menunjukkan sikap saling menghormati terhadap pendapat yang berbeda. Mendorong dialog yang konstruktif dan terbuka serta menghindari sikap merendahkan atau menyerang secara pribadi.

3. Rapat Pleno di Balai Legislatif (Baleg)

Rapat Pleno merupakan pertemuan resmi yang diadakan oleh suatu lembaga legislatif untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai suatu isu atau agenda tertentu. Dalam rapat ini semua anggota baik lembaga legislasi maupun organisasi diundang untuk hadir dan berpartisipasi dalam rapat.



Gambar 3. 4 **Rapat Pleno Pembahasan RUU yang akan di Carry Over**

Kegiatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia (DPR RI), khususnya terkait dengan RUU yang akan di *Carry Over* ke periode berikutnya. Penulis akan terlibat secara aktif dalam mengamati rapat pleno, menganalisis evaluasi Prolegnas, dan berdiskusi dengan pembimbing. Melalui pengalaman ini, penulis diharapkan dapat mengembangkan keterampilan analisis kritis dan pemahaman tentang prioritas legislasi yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan rakyat republik Indonesia (DPR RI) . Kegiatan ini juga memberikan kesempatan untuk memahami tantangan dan dinamika yang terjadi dalam proses pembentukan Undang-Undang.

Dalam rapat ini Anggota harus memastikan bahwa rapat berlangsung dengan baik dan harus ada etika dan tanggung jawab yang dilakukan Anggota yaitu diharapkan untuk berkontribusi aktif dalam diskusi, memberikan masukan yang relevan dan mengajukan pertanyaan yang dapat memperdalam pemahaman terhadap isu yang dibahas. Keterlibatan aktif ini tidak hanya mencerminkan komitmen anggota tetapi juga memperkaya proses pengambilan keputusan.

4. Rapat penyusunan DIM RUU Paten 2024



Gambar 3. 5 ***Rapat di Fraksi penyusunan DIM RUU Paten 2024***

Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung dalam proses penyusunan RUU, khususnya RUU Paten 2024. Dengan mengikuti rapat

fraksi, penulis mendapatkan wawasan tentang bagaimana fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan rakyat republik Indonesia (DPR RI) berkolaborasi dan mendiskusikan isu-isu penting yang berkaitan dengan legislasi. Proses pencatatan dan analisis selama rapat akan membantu penulis memahami tantangan yang dihadapi dalam pengembangan undang-undang dan peran masing-masing fraksi dalam mempengaruhi keputusan akhir. Kegiatan ini juga akan meningkatkan kemampuan penulis dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dalam konteks profesional.

Penting bagi anggota menunjukkan etika dan tanggung jawab yang tinggi yaitu menjadi teladan yang harus bertindak sebagai contoh yang baik dalam perilaku dan etika kerja yang bersifat profesionalisme dan integritas harus selalu ditunjukkan dalam setiap interaksi. Menciptakan suasana di mana mahasiswa merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi. Anggota harus mendengarkan dengan baik dan menghargai pendapat serta pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa dan saat menjelaskan proses atau kebijakan penyusunan DIM anggota harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari istilah teknis yang mungkin membingungkan mahasiswa.

5. Diskusi Publik

Fraksi sering kali mengadakan kegiatan diskusi publik yang menjadi forum penting yang melibatkan masyarakat dan mahasiswa dalam proses Legislasi dan pengambilan keputusan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi, pandangan dan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat akademisi dan organisasi non-pemerintahan. Dalam proses diskusi Fraksi sudah melakukan persiapan, penyusunan agenda, menentukan lokasi dan mengundang narasumber serta peserta yang relevan. Dalam diskusi Fraksi sudah memfasilitasi dialog antara narasumber dan peserta serta diikuti sesi tanya jawab.



Gambar 3. 6 ***Diskusi F-PAN DPR RI***

Diskusi publik yang diadakan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan tema "Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang kepada Ormas Keagamaan" bertujuan untuk mengeksplorasi dan membahas berbagai perspektif mengenai isu kontroversial yang menggali pandangan masyarakat terkait polemik pemberian izin kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan untuk mengelola tambang. Diskusi ini juga bertujuan untuk mendapatkan masukan dengan cara mengumpulkan pendapat dari berbagai *stakeholder* termasuk tokoh agama, masyarakat dan ahli lingkungan mengenai dampak sosial , ekonomi dan lingkungan dari kebijakan ini. Narasumber dalam diskusi ini adalah Arifin Tasrif selaku menteri ESDM republik Indonesia (RI), H. Eddy Soeparno selaku Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), KH. Ulil Abshar dari PBNU, Ihsan Tanjung selaku pengamat kebijakan publik Muhammadiyah, dan Singgih Widagdo selaku Ketua IMEF yang bertugas sebagai pengamat.

Dalam kegiatan ini penulis berpartisipasi sebagai panitia yang membantu staf untuk melancarkan proses kegiatan seperti menjaga absensi penerimaan tamu dan juga membantu pelaksaan selama kegiatan berlangsung.



Gambar 3. 7 ***Diskusi F-PAN DPR RI***

Diskusi ke-2 (dua) yang dihadiri penulis ialah diskusi yang diadakan di ruang rapat Fraksi dengan tema "Mewujudkan Fraksi PAN yang Sensitif Gender" yang bertujuan untuk membahas dan memperkuat komitmen fraksi terhadap kesetaraan gender dalam kebijakan dan praktik legislatif. Tujuan diskusi untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong anggota fraksi dan masyarakat untuk lebih memahami pentingnya perspektif gender dalam pembuatan kebijakan, menggali strategi dan langkah konkret untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi semua gender. Diskusi ini turut menghadirkan narasumber yaitu Hj. Intan Fauzi, SH., LL,M selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan juga Ketua Umum PeremPUAN Amanat, Ravio Patra selaku WFD *Country Director*-Indonesia, Ai Fatimah Nur Faud, Ph.D Pakar kajian perempuan Dekan FAI UHAMKA, Andy Yentriyani Komisioner Komnas Perempuan dan Dr. Saleh Partanonan Daulay selaku Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Kegiatan ini berlangsung di tanggal 10 Juli 2024, acara ini bekerja sama dengan mahasiswa AMIKOM Yogyakarta. Dalam diskusi ini ditekankan bahwa masalah pelecehan tidak hanya dialami oleh perempuan saja namun juga dialami oleh laki-laki, *transgender* dan *tranpuan*. Dalam

pandangan yang luas tenteng gender pelecehan seksual dan diskriminasi dapat menimpa siapa saja tanpa memandang jenis kelamin atau identitas gender. Dengan adanya diskusi ini diharapkan terbukanya ruang dialog yang lebih luas dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keadilan dan kesetaraan gender.

Dalam diskusi publik anggota harus bersikap profesional dalam berbicara dan berinteraksi dengan peserta diskusi hal ini mencakup dalam penggunaan bahasa yang sopan, menghargai pendapat peserta diskusi dan menjaga sikap positif. Anggota diharapkan menunjukkan kemampuan untuk mendengarkan dengan baik mencakup perhatian terhadap pandangan dan masukan yang disampaikan oleh peserta diskusi publik tanpa menginterupsi. Saat menyampaikan pandangan atau menjawab pertanyaan, anggota diharapkan memberikan informasi yang akurat dan berbasis fakta yang sangat penting untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata peserta diskusi publik.

6. Rapat di Komisi V

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah salah satu Komisi yang bertanggung jawab dalam pengembangan wilayah. Rapat yang diadakan di Komisi V memiliki beberapa tujuan dan format yang khas. Di antaranya rapat yang biasanya diadakan di Komisi V bertujuan membahas kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan infrastruktur, transportasi dan pembangunan. Rapat ini di Komisi V juga di khususkan untuk menilai pelaksaan program yang telah berjalan termasuk proyek-proyek infrastruktur yang sedang dan telah dilaksanakan. Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan efisien untuk proyek-proyek yang menjadi tanggung jawab Komisi. Jenis Rapat yang diadakan meliputi Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dalam pelaksanaannya mengundang *stakeholder* terkait, seperti kementerian, perusahaan dan masyarakat untuk mendengarkan pandangan dan masukan mereka. Kemudian Rapat kerja yang merupakan rapat internal anggota Komisi untuk membahas agenda dan strategi kerja Komisi dan Rapat Pleno yang mengundang

semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk membahas isu-isu penting yang memerlukan keputusan bersama.



Gambar 3. 8 ***Raker dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi***

Rapat Kerja (Raker) Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk Tahun anggaran 2025. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membahas alokasi anggaran dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2025, serta memastikan bahwa program-program kementerian sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat desa.



Gambar 3. 9 ***RDP dengan kepala BMKG dan BNPP/Basarnas***

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB/Basarnas) membahas tentang realisasi dan penggunaan anggaran hingga bulan Agustus 2024 untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Mengkaji laporan keuangan untuk menilai kinerja pengelolaan anggaran tahun sebelumnya dan mendiskusikan Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau BMKG dan BNPP/Basarnas dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2025, guna memastikan alokasi yang tepat untuk mendukung program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengamatan cuaca dan penanggulangan bencana.

Anggota harus menjaga etika komunikasi yaitu menggunakan bahasa yang tidak menyinggung dan menghormati semua peserta agar suasana diskusi menjadi kondusif dan menghargai semua pihak yang terlibat dalam rapat yang berlangsung. Anggota harus bersikap terbuka terhadap kritik dan masukan, keterbukaan ini menciptakan suasana di mana peserta merasa nyaman untuk berbagi pandangan mereka. Diskusi yang berlangsung harus tetap pada tema yang ditentukan hal ini bertujuan agar menghindari pembicara yang tidak relevan membantu menjaga efisiensi rapat. Anggota juga bertanggung jawab untuk menjaga waktu yang telah dialokasikan untuk masing-masing pembicara, menghindari pembicara yang berlarut-larut membantu menjaga efisiensi rapat.

7. Rapat di Komisi X

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bertanggung jawab atas berbagai isu terkait dengan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga. Rapat yang diadakan oleh Komisi X bertujuan untuk membahas kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan sektor pendidikan, kebudayaan, pariwisata serta pemuda dan olahraga. Mengevaluasi program yang telah berjalan di sektor-sektor tersebut, termasuk hasil dan dampaknya dan memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dan efisiensi untuk program-program yang menjadi tanggung jawab Komisi.

Jenis Rapat yang biasa dilaksanakan di Komisi X meliputi, Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang turut mengundang *stakeholder* terkait, seperti kementerian, lembaga dan masyarakat untuk mendengarkan pandangan dan masukan mereka, Rapat Kerja Internal antar anggota Komisi untuk membahas agenda dan strategi kerja Komisi dan Rapat Pleno yang melibatkan semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk membahas isu-isu penting yang membutuhkan keputusan bersama.



Gambar 3. 10 ***RDPU Komisi X DPR RI dengan Forum Guru***

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan berbagai Forum Guru, termasuk Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guri (P2G), Forum Guru Prioritas Pertama KCD XII, Forum Guru Honorer Lulus *Passing Grade* seluruh Indonesia (FGHNLPSI), Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) dan Guru Honorer Negeri 10+ (GHN 10+) dari Lampung Utara. Rapat ini diadakan untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi oleh guru yaitu dampak penempatan guru P3K terhadap guru honorer yang ada saat ini, aspirasi terkait status dan hak-hak guru honorer P1 dan mengangkat isu mengenai guru yang telah *passing grad*e tetapi belum mendapatkan formasi.

Agar rapat ini berjalan dengan efektif dan produktif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) harus menunjukkan

perhatian yang tulus terhadap pernyataan dan masukan yang disampaikan oleh perwakilan guru, hal ini meliputi menginterupsi dan memberikan kesempatan bagi seluruh peserta untuk berbicara. Bersikap profesional dalam setiap interaksi yang mencakup penggunaan bahasa yang sopan dan menghargai semua peserta terlepas dari latar belakang atau asal mereka. Setelah mendengarkan masukan, anggota harus memberikan umpan balik yang membangun dan menjelaskan bagaimana masukan tersebut akan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

D. Analisis Pelaksanaan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM)

1. Kendala yang dihadapi penulis

Dalam proses pelaksanaan Program Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) terdapat kendala yang mempengaruhi berjalannya proses kegiatan ini berlangsung dan hal ini tidak bisa dihindari karena sejatinya sebuah kendala akan selalu ada dalam proses yang kita hadapi, berikut adalah kendala yang dihadapi penulis dalam pelaksaan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM).

a. Masa Reses

Masa Reses adalah periode yang di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak menjalankan kegiatan resmi di gedung parlemen, selama periode ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki kesempatan untuk kembali ke daerah pemilihan mereka, berinteraksi dengan konstituen dan melakukan kegiatan sosial atau kunjungan kerja. Masa Reses biasanya berlangsung beberapa minggu dalam setahun dan pada saat ini anggota mendengarkan aspirasi masyarakat serta mengumpulkan informasi untuk mendukung tugas legislasi.

Penulis mendapatkan kendala pada masa periode berlangsung karena periode berlangsung dari tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024 terhitung 1 (satu) bulan lamanya, hal ini berbentrokan dengan jadwal Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) yang ditetapkan dari kampus karena jika mengikuti jadwal seharusnya Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) selesai di tanggal 16 Agustus 2024.

Selama periode Reses berlangsung penulis tidak memiliki banyak kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas legislasi, penulis juga kesulitan mengakses informasi sehingga informasi dan juga catatan untuk laporan sangat kurang.

b. Minim Informasi terkait sistem pemerintahan

Penulis terkendala terkait dengan tidak biasa dengan istilah-istilah teknis dalam politik atau kebijakan, penulis juga terkendala dalam keterbatasan pengetahuan tentang undang-undang yang berlaku sebelumnya dan informasi yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh penulis.

2. Cara Mengatasi Kendala

a. Dalam mengatasi kendala ini penulis mencari kegiatan alternatif lainnya seperti berdiskusi bersama mahasiswa magang dari kampus lain yang mengambil jurusan berbeda dengan tujuan bertukar pikiran terkait hukum dan pemerintahan. Menggunakan platform digital untuk mengakses dokumen, berita dan informasi terkait dengan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) termasuk laporan dan publikasi resmi. Mengikuti akun resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di media sosial untuk mendapatkan pembaruan terkini dan informasi yang relevan. Serta aktif dalam diskusi kecil bersama pembimbing Praktik Profesi Mahasiswa (PPM). Dalam periode Reses ini juga dimanfaatkan oleh penulis untuk menyusun laporan kegiatan harian dan juga laporan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM)

b. Untuk mengatasi kendala ini penulis belajar dan bertanya terkait isu dan juga istilah tersebut kepada pembimbing magang serta mempelajari hal baru lainnya melalui *website* atau sosial media yang bisa memberikan informasi baru kepada penulis. Penulis juga tidak segan untuk bertanya kepada rekan magang lainnya terkait pengetahuan dan informasi yang tidak diketahui oleh penulis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) di Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memberikan pengalaman yang signifikan bagi penulis dalam memahami dinamika politik dan pengelolaan lembaga legislatif. Selama delapan minggu pelaksanaan, penulis dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik nyata, mengembangkan keterampilan komunikasi, dan membangun jaringan profesional yang bermanfaat untuk karir di masa depan.

Melalui kegiatan ini, penulis tidak hanya mendapatkan wawasan mendalam tentang proses legislasi, tetapi juga belajar bagaimana berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan staf administratif. Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) ini juga menumbuhkan sikap profesionalisme, meningkatkan kemampuan *problem-solving,* dan memberikan pengalaman berharga dalam analisis dan evaluasi kebijakan.

Secara keseluruhan, Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah memenuhi tujuannya sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, mempersiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan di dunia kerja, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan institusi pendidikan dan masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan pada pengalaman penulis selama proses pelaksanaan kegiatan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM), terdapat beberapa saran yang dapat menjadi masukan untuk pelaksanaan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) di masa mendatang yaitu :

1. Bagi Mahasiswa

a. Mahasiswa yang akan menjalankan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) disarankan untuk mempersiapkan diri terkait dengan lembaga yang dituju nantinya, mulai dari kesiapan pengetahuan terkait lembaga dan kesiapan dalam mengikuti aturan yang akan ditetapkan oleh lembaga yang dituju.
b. Mencari informasi terkait lembaga dari waktu pelaksanaan ditentukan, hal ini menghindari waktu yang terlalu dekat dengan jadwal pelaksanaan dan kesusahan dalam proses pencarian lembaga yang bisa dituju nantinya.
c. Mengatur waktu yang efisien dengan jarak tempuh nantinya karena keadaan lalu lintas Jakarta yang tidak efisien.
d. intens berkomunikasi dengan dosen pembimbing serta dengan pembimbing lapangan dan rekan kerja, agar dalam proses Praktik Profesi Mahasiswa dapat berlangsung dengan baik dan maksimal.

2. Bagi Kampus

a. Menyediakan wadah kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri di luar dari pelajaran mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat membantu mahasiswa lebih siap nantinya dalam proses pelaksanaan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM)

b. Diharapkan Kampus dapat menjalin mitra kerja dengan beberapa lembaga, agar bisa membantu mahasiswa dalam mendapatkan lembaga yang ketersediaan tempat pelaksaan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM) lebih mudah.

c. Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa paham apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan ke depannya sehingga tidak ada kebingungan dalam diri mahasiswa dalam mencari lembaga yang dituju.

3. Bagi Lembaga Praktik Profesi Mahasiswa (PPM)

a. Membangun jaringan alumni magang yang dapat membantu mahasiswa baru dalam mendapatkan informasi, bimbingan dan peluang kerja dimasa depan.

b. Melakukan evaluasi rutin terhadap program dan meminta umpan balik dari mahasiswa agar program dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan.

c. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam proyek atau inisiatif yang berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

dkk, Fajriudin Muttaqin. *SEJARAH PERGERAKAN NASIONAL*. Humaniora, 2015.

RI, Setjen DPR. "Alat Kelengkapan Dewan - Dewan Perwakilan Rakyat." Accessed September 3, 2024. https://www.dpr.go.id/akd/komisi.

———. "Tentang DPR - Dewan Perwakilan Rakyat." Accessed September 3, 2024. https://www.dpr.go.id/tentang/fraksi.

Tumuhu, Norisman. "FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA INDONESIA (DPR-RI)." *LEX ADMINISTRATUM* 1, no. 2 (November 9, 2013). Accessed September 3, 2024. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/3029.

"Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia – Kompaspedia." Accessed September 3, 2024. https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/dewan-perwakilan-rakyat-republik-indonesia.

"Partai Amanat Nasional (PAN)." *Tribunnewswiki.com*. Accessed September 3, 2024. https://www.tribunnewswiki.com/2019/08/23/partai-amanat-nasional-pan.

"Sejarah Partai PAN, Prinsip Dasar, Dan Nomor Urut Pemilu 2024." Accessed September 3, 2024. https://tirto.id/sejarah-partai-pan-prinsip-dasar-dan-nomor-urut-pemilu-2024-gCVT.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

SEKRETARIAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS
NOMOR: 02.1674/PKPF/FPAN/DPR RI/VII/2024

Kepada Yth. : Kepala Bagian Pamdal DPR RI
Dari : Penyusun Kesekretariatan Pimpinan Fraksi PAN DPR RI
Perihal : Permohonan ID Card
Tanggal : 01 Juni 2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, Sekretariat Fraksi PAN DPR RI menerangkan bahwa nama di berikut ini:

No	Nama	Keterangan
1.	Azizah Amanuroh	Staf Magang Fraksi PAN
2.	Sulis Setia Ningsih	Staf Magang Fraksi PAN

Mohon Bantuan untuk dibuatkan Kartu Akses.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 01 Juni 2024

Koordinator Sekretariatan Fraksi PAN DPR RI

Suparno
NIP. 196704281992031003

4/7/24

Lampiran 2



FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Gedung Nusantara I MPR / DPR - RI, Lt. 20 Ruang 2009
Jl. Jend. Gatot Subroto,Senayan, Jakarta 10270 INDONESIA
Telp. : (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax. : (+6221) 575 5811

PAN

Nomor : 02.1679/PKPF/F-PAN/DPR RI/VII/2024 04 Juli 2024
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Magang di Fraksi PAN DPR RI

Kepada Yth.
Universitas STAI Sadra
Jakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat dari Universitas STAI Sadra nomor : 160/EDU-EXT/STAI-SADRA/PPM/V/2024 perihal permohonan Magang. Pimpinan Fraksi PAN DPR RI dapat menerima permohonan magang mahasiswa Universitas STAI Sadra Fakulas Ilmu Ushuluddin atas nama :

No	Nama	NIM	Jurusan
1.	Sulis Setia Ningsih	21101211021	Aqidah dan Filsafat Isla,
2.	Azizah Amanuroh	21101111004	Ilmu AL-Quran dan Tafsir

Dimulai magang di Fraksi PAN DPR RI dari bulan 08 Juli 2024 sampai 16 Agustus 2024.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, 04 Juli 2024

a,n Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI
Kepala Sekretariat Fraksi PAN DPR RI

Suparmo
Nip 19670428199203l003

Lampiran 3

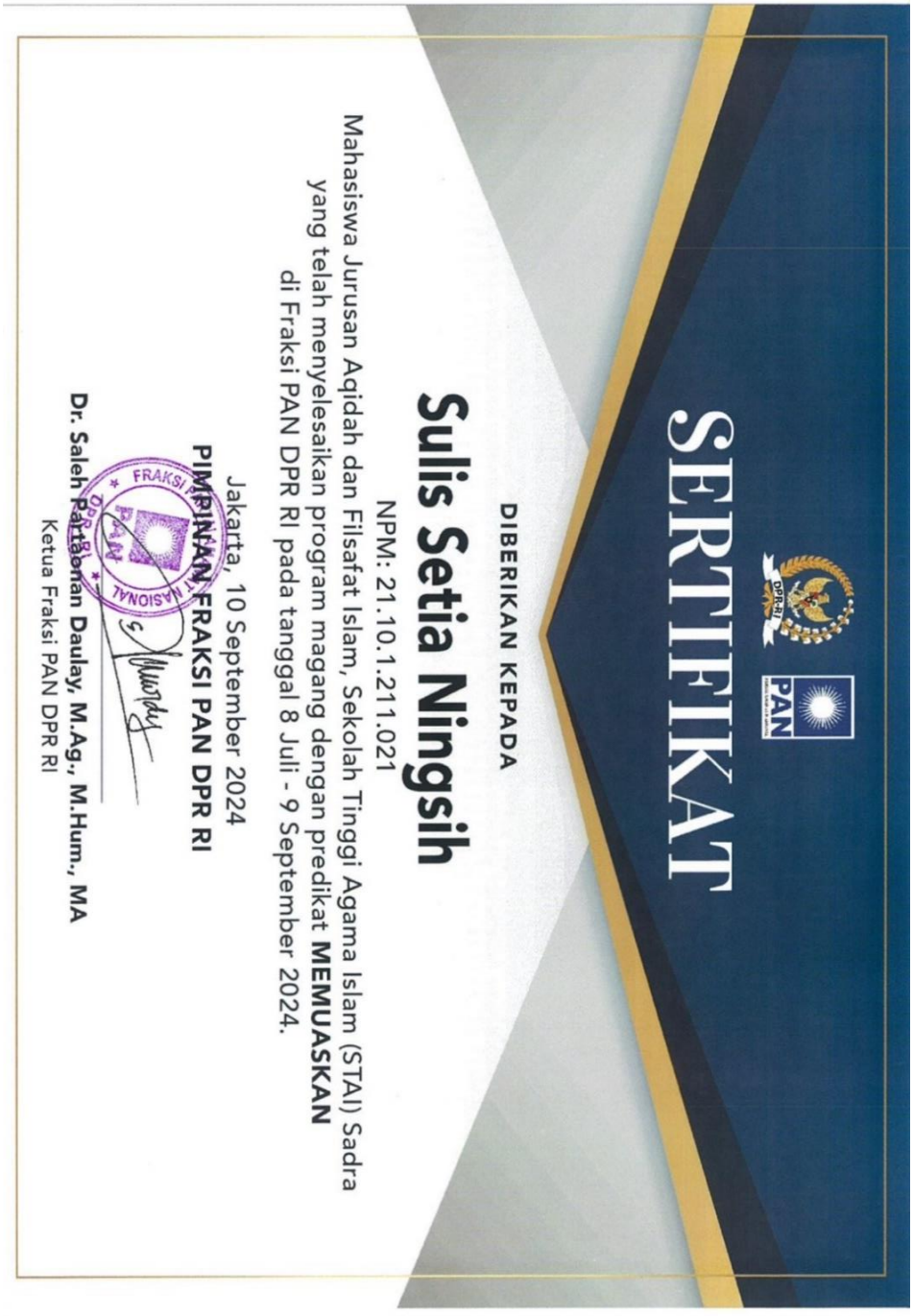

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NAMA .SULIS SETIA.N
PEKERJAAN .MAGANG BAG
FRAKSI PAN
BERLAKU S/D 30 SEPT 2024


KETENTUAN
1. Kartu identitas ini merupakan kartu untuk memasuki komplek Gedung Perkantoran MPR/DPR/DPD-RI.
2. Pemakaian Kartu ini hanya diperuntukkan bagi yang Namanya tercantum dalam kartu dan mohon dipakai selama berada di Komplek Gedung Perkantoran MPR/DPR/DPD-RI
3. Kartu ini wajib dikembalikan kepada Bagian Pam SETJEN DPR RI apabila sudah habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang diatur
4. Apabila Kartu ini hilang/ ditemukan harap melaporkan/ menghubungi Bagian PAM SETJEN DPR RI Telp. 5715600/431/590
BIRO UMUM
BAGIAN PAM DPR RI

Lampiran 4


SERTIFIKAT
PESERTA
Diberikan kepada
Sulis Setia Ningsih
Atas partisipasinya sebagai peserta dalam webinar "Mewujudkan Fraksi PAN Yang Sensetif Gender" yang diadakan oleh Fraksi PAN DPR RI pada tanggal 10 Juli 2024, di Gedung Nusantara 1 Lt. 20
Ketua Fraksi PAN DPR RI
Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A.

Lampiran 5



SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Sulis Setia Ningsih

NPM: 21.10.1.211.021

Mahasiswa Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra yang telah menyelesaikan program magang dengan predikat **MEMUASKAN** di Fraksi PAN DPR RI pada tanggal 8 Juli - 9 September 2024.

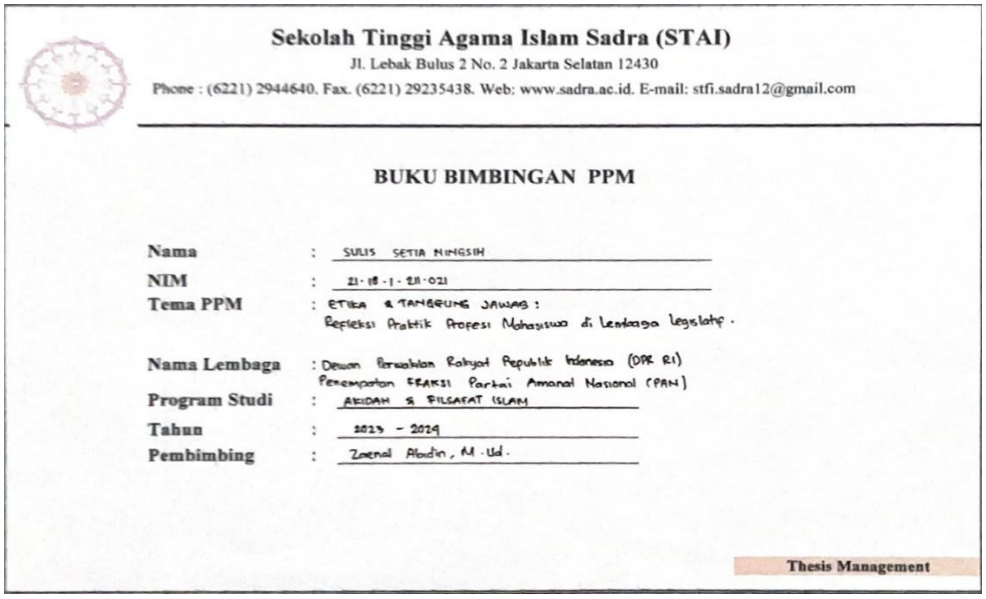
Jakarta, 10 September 2024

PIMPINAN FRAKSI PAN DPR RI

Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., MA

Ketua Fraksi PAN DPR RI

Lampiran 6



Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra (STAI)

Jl. Lebak Bulus 2 No. 2 Jakarta Selatan 12430

Phone : (6221) 2944640. Fax. (6221) 29235438. Web: www.sadra.ac.id. E-mail: stfi.sadra12@gmail.com

BUKU BIMBINGAN PPM

Nama : SULIS SETIA NINGSIH

NIM : 21-18-1-21-021

Tema PPM : ETIKA & TANGGUNG JAWAB : Refleksi Praktik Profesi Mahasiswa di Lembaga Legislatif.

Nama Lembaga : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Penempatan FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN)

Program Studi : AKIDAH & FILSAFAT ISLAM

Tahun : 2023 - 2024

Pembimbing : Zaenal Abidin, M.Ud.

Thesis Management

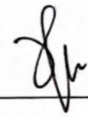
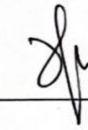
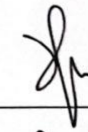
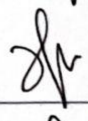
No.	Tanggal	Tema Bimbingan	Rekomendasi/Saran	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Jum'at 05 Juli 2024	Pemberian tugas yang harus di lakukan selama magang	- Mengamati cara kerja DPR RI - Mengamati setiap kegiatan yang berlangsug di DPR RI	
2.	Minggu 14 Juli 2024	Masukan untuk fokus apa yang harus dilakukan selama masa RESES	- Fokus ke KOMISI dan patner kerjanya - Selalu update isu terbaru - Membuat detail dalam laporan agar tidak bertele-tele.	
3.	Selasa 30 Juli 2024	Tindak lanjut tentang kegiatan apa yang sudah dilakukan dan tahap pembuatan laporan	- Fokus ke I KOMISI dan apa yang menjadi topik di dalamnya - Pembuatan laporan harus dicicil dari sekarang - Coba cari *link* dan wawancarai anggota/TA yang ada	
4.	Selasa 03 September 2024	Memberi masukan tentang proses presentasi yang akan dilakukan di tempat magang dan memberikan pengarahan terkait penulisan laporan	- Saat membuat materi tentang RUU Pilkada tidak boleh main=main dan harus sesuai dengan data - Penulisan laporan harus langsung *point* dan jangan bertele-tele	
5.	Rabu 04 September 2024	Latihan untuk presentasi akhir sebagai syarat menerima surat hasil PPM dan juga membahas penulisan laporan	- Saat presentasi baiknya jangan terlihat seperti membaca - Penulisan laporan harus bersifat konsisten	
6.	Kamis 05 September 2024	Kunjungan pembimbing ke tempat PPM	- Pembimbing mengunjungi lembaga untuk memantau proses presentasi	

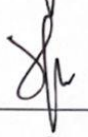
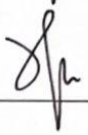
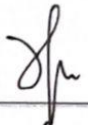
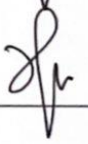
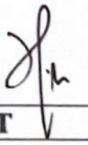
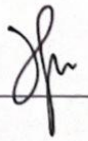
Lampiran 7

KEHADIRAN PRAKTIK PROFESI MAHASISWA (PPM)

NAMA : SULIS SETIA NINGSIH

NIM : 21.10.1.211.021

No.	Tanggal	Jam Masuk	Jam Keluar	Paraf Penanggung Jawab Magang
1.	Senin, 08 Juli 2024	09:42	15:34	
2.	Selasa, 09 Juli 2024	09:17	16:10	
3.	Rabu, 10 Juli 2024	09:42	16:40	
4.	Kamis, 11 Juli 2024	10:19	14.23	
5.	Jum'at, 12 Juli 2024	LIBUR		
6.	Sabtu, 13 Juli 2024			
7.	Minggu, 14 Juli 2024			
8.	Senin, 15 Juli 2024	09:04	14:11	
9.	Selasa, 16 Juli 2024	10:34	14:27	
10.	Rabu, 17 Juli 2024	10:09	16:08	
11.	Kamis, 18 Juli 2024	11:05	15:08	
12.	Jum'at, 19 Juli 2024	LIBUR		
11.	Sabtu, 20 Juli 2024			
12.	Minggu, 21 Juli 2024			

13.	Senin, 22 Juli 2024	**11:08**	**15:29**	
14.	Selasa, 23 Juli 2024	**11:50**	**16:59**	
15.	Rabu, 24 Juli 2024	**11:31**	**14:49**	
16.	Kamis, 25 Juli 2024	**09:45**	**12:49**	
17.	Jum'at, 26 Juli 2024	**LIBUR**		
18.	Sabtu, 27 Juli 2024			
19.	Minggu, 28 Juli 2024			
20.	Senin, 29 Juli 2024	**IZIN**		
21.	Selasa, 30 Juli 2024	**11:04**	**15:08**	
22.	Rabu, 31 Juli 2024	**11:05**	**16:48**	
23.	Kamis, 01 Agustus 2024	**10:57**	**14:10**	
24.	Jum'at, 02 Agustus 2024	**LIBUR**		
25.	Sabtu, 03 Agustus 2024			
26.	Minggu, 04 Agustus 2024			
27.	Senin, 05 Agustus 2024	**11:13**	**15:59**	
28.	Selasa, 06 Agustus 2024	**IZIN SAKIT**		
29.	Rabu, 07 Agustus 2024	**11.33**	**16:45**	
30.	Kamis, 08 Agustus 2024	**12:59**	**16:31**	

31.	Jum'at, 09 Agustus 2024	**LIBUR**		
32.	Sabtu, 10 Agustus 2024			
33.	Minggu, 11 Agustus 2024			
34.	Senin, 12 Agustus 2024	**11:45**	**15:20**	
35.	Selasa, 13 Agustus 2024	**12:00**	**15:30**	
36.	Rabu, 14 Agustus 2024	**11:20**	**16:30**	
37.	Kamis, 15 Agustus 2024	**11:25**	**17:40**	
38.	Jum'at, 16 Agustus 2024	**LIBUR**		
39.	Sabtu, 17 Agustus 2024			
40.	Minggu, 18 Agustus 2024			
41.	Senin, 19 Agustus 2024	**10:40**	**15: 40**	
42.	Selasa, 20 Agustus 2024	**11:00**	**17:10**	
43.	Rabu, 21 Agustus 2024	**11:10**	**16:45**	
44.	Kamis, 22 Agustus 2024	**09:10**	**16:35**	
45.	Jumat, 23 Agustus 2024	**LIBUR**		
46.	Sabtu, 24 Agustus 2024			
47.	Minggu, 25 Agustus 2024			
48.	Senin, 26 Agustus 2024	**13:00**	**16:15**	
49.	Selasa, 27 Agustus 2024	**11:35**	**14:50**	

Mengetahui,

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
PAN
DPR-RI

Pembimbing Magang

Lampiran 8

LAPORAN REALISASI PRAKTIK PROFESI MAHASISWA (PPM)

Nama : Sulis Setia Ningsih

NIM : 21.10.1.211.021

Nama Lembaga : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi PAN

Kunjungan Ke-1

No.	Hari	Tanggal	Jenis Kegiatan Yang Dilakukan Mahasiswa	Paraf Pembimbing Magang
1.	Jum'at	17 Mei 2024	- Membuat janji yemu dengan ibu Annisa Zakiah Psb, S. Sos di kantor Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) - Mengantar surat permohonan izin magang dari kampus ke kantor sekretariat Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)	

Kunjungan Ke-2

No.	Hari	Tanggal	Jenis Kegiatan Yang Dilakukan Mahasiswa	Paraf Pembimbing Magang
1.	Rabu	26 Juni 2024	- Mengantarkan berkas yang diperlukan untuk membuat ID Card Peserta Magang - Menjadi panitia membantu kegiatan Diskusi Fraksi PAN DPR RI di Komisi IX yang bertema "POLEMIK PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN TAMBANG KEPADA ORMAS KEAGAMAAN"	

Minggu Ke-1

No.	Hari	Tanggal	Jenis Kegiatan Yang Dilakukan Mahasiswa	Paraf Pembimbing Magang
1.	Senin	08 Juli 2024	- **Pengenalan lingkungan DPR RI oleh pembina magang** - **Mengantarkan berkas pembuatan ID Card dari Sekjen Fraksi ke Nusantara II bagian pembuatan ID Card** - **Diskusi tentang pemerintahan bersama pembina magang**	
2.	Selasa	09 Juli 2024	- **Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024** 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas 26 (dua puluh enam) Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota; 3. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap 27 (dua puluh tujuh) RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI ; 4. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul inisiatif	

3.	**Rabu**	**10 Juli 2024**	- **Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dengan menghadirkan KASAD, KASAL dan KASAU. (TERTUTUP)** Pembahasan permohonan persetujuan revisi RKA-K/L UO Kemhan tentang penambahan 23 (dua puluh tiga) kegiatan PDN dalam DIPA tahun 2024. - **Diskusi Fraksi PAN DPR RI dengan tema "MEWUJUDKAN FRAKSI PAN YANG SENSITIF GENDER"**	
4.	**Kamis**	**11 Juli 2024**	- **Rapat Paripurna Ke-22 Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.** 1. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI; 2. Pidato Ketua DPR RI pada Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024. - **Foto bersama mahasiswa magang yang lain di Nusantara II**	

Minggu Ke-2

No.	Hari	Tanggal	Jenis Kegiatan Yang Dilakukan Mahasiswa	Paraf Pembimbing Magang
1.	Senin	15 Juli 2024	- Mempelajari data yang ada di laman Website Dewan Perwakilan Rakyat (dpr.go.id)	
2.	Selasa	16 Juli 2024	- Diskusi bersama mahasiswa magang dan pembimbing magang tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)	
3.	Rabu	17 Juli 2024	- Diskusi bersama mahasiswa magang dari kampus Universitas Pancasila dan UIN Walisongo Semarang di Perpustakaan DPR RI membahas tentang Hukum dan Ilmu Komunikasi	
4.	Kamis	18 Juli 2024	- Diskusi bersama mahasiswa magang dan pembimbing magang tentang Dasar-dasar Negara dan Dasar-dasar ilmu politik. - Kunjungan ke Bazar yang dilaksanakan di Nusantara II.	

Minggu Ke-3

No.	Hari	Tanggal	Jenis Kegiatan Yang Dilakukan Mahasiswa	Paraf Pembimbing Magang
1.	Senin	22 Juli 2024	- Tour bersama rekan magang dari Fraksi PAN dikawasan DPR/MPR RI - Berkunjung ke kandang rusa yang ada di kawasan taman DPR/MPR RI	
2.	Selasa	23 Juli 2024	- Diskusi tentang RUU RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) - Presentasi mahasiswa AMIKOM Yogyakarta via Zoom dengan topik pembahasan tentang "ISU PEMBERIAN IZIN ORMAS KEAGAMAAN DALAM MENGELOLA TAMBANG"	
3.	Rabu	24 Juli 2024	- Menyusun laporan magang harian bersama mahasiswa UIN Walisongo Semarang di Perpustakaan DPR RI	
4.	Kamis	25 Juli 2024	- Kunjungan ke Pujasera bersama mahasiswa Universitas Sumatra Utara	

Minggu Ke-4

No.	Hari	Tanggal	Jenis Kegiatan Yang Dilakukan Mahasiswa	Paraf Pembimbing Magang
1.	Senin	29 Juli 2024	IZIN	
2.	Selasa	30 Juli 2024	- Diskusi dan presentasi mahasiswa UNES dengan tema "Promlematika Penempatan Guru Berstatus Prioritas Pertama (P1)	
3.	Rabu	31 Juli 2024	- Presentasi Mahasiswa UIN Walisongo Semarang dengan tema " - Diskusi dan presentasi Mahasiswa Universitas Sumatra Utara tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Aturan Hukum Indonesia"	
4.	Kamis	01 Agustus 2024	- Membuat laporan kegiatan harian.	

Minggu Ke-5

No.	Hari	Tanggal	Jenis Kegiatan Yang Dilakukan Mahasiswa	Paraf Pembimbing Magang
1.	Senin	05 Agustus 2024	- Menyusun laporan kegiatan harian	
2.	Selasa	06 Agustus 2024	- Menyusun laporan kegiatan harian dan laporan PPM - Mempelajari Rapat PLENO Pembahasan RUU yang akan di *Carry Over* kepada Anggota DPR RI Periode 2024-2029. #BalegDPR - Mempelajari Evaluasi Prolegnas per 11 Juli 2024 - Diskusi bersama pembimbing magang tentang *Carry Over.*	
3.	Rabu	07 Agustus 2024	- Menyusun laporan kegiatan harian - Berkunjung ke Rooftop bersama mahasiswa magang lainnya	
4.	Kamis	08 Agustus 2024	- Diskusi bersama pembina magang tentang pengawasan haji dan pembentukan pansus - Menyusun laporan magang harian	

Minggu Ke-6

No.	Hari	Tanggal	Jenis Kegiatan Yang Dilakukan Mahasiswa	Paraf Pembimbing Magang
1.	Senin	12 Agustus 2024	- Menyusun laporan kegiatan harian dan laporan PPM	
2.	Selasa	13 Agustus 2024	- Menyusun laporan kegiatan harian	
3.	Rabu	14 Agustus 2024	- Mengikuti rapat fraksi tentang penyusunan DIM ke Fraksi-fraksi RUU Paten 2024	
4.	Kamis	15 Agustus 2024	- Mengikuti rapat lanjutan penyusunan DIM ke Fraksi-fraksi RUU Paten 2024 - Mengunjungi gedung Nusantara dan melihat segala latihan dan persiapan tempat yang akan dilaksanakan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang bersama DPR RI-DPD RI dan sidang Paripurna DPR RI yang akan dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2024.	

Minggu Ke-7

No.	Hari	Tanggal	Jenis Kegiatan Yang Dilakukan Mahasiswa	Paraf Pembimbing Magang
1.	Senin	19 Agustus 2024	- Menyusun laporan kegiatan harian.	
2.	Selasa	20 Agustus 2024	IZIN SAKIT	
3.	Rabu	21 Agustus 2024	- Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan pemerintah dan DPD RI penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU RUU Pilkada - KOMISI V DPR RI Raker dengan Menteri PUPR 1. Membahas Evaluasi APBN TA. 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 2. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA 2023	
4.	Kamis	22 Agustus 2024	- Sedikit diskusi dan wejangan dari staf terkait bagaimana seorang mahasiswa seharusnya mengambil keputusan dan capa pandang mahasiswa tentang isu yang sedang di Demokan. - Semua kegiatan dibatalkan karna ada aksi DEMO di depan gedung DPR/MPR RI	

Minggu Ke-8

No.	Hari	Tanggal	Jenis Kegiatan Yang Dilakukan Mahasiswa	Paraf Pembimbing Magang
1.	Senin	26 Agustus 2024	- **Menghadiri rapat dengar yang dilaksanakan di Komisi II**	
2.	Selasa	27 Agustus 2024	- **Komisi V DPR RI RAKER dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi** Membahas RKA K/L TA. 2025 Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2025. - **Komisi V DPR RI RDP dengan Kepala BMKG dan BNPP/Basarnas** 1. Membahas Evaluasi APBN TA. 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024. 2. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN TA. 2023. 3. Membahas RKA K/L TA. 2025 BMKG dan BNPP/Basarnas dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2025.p	

Lampiran 9

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Gedung Nusantara I MPR / DPR - RI, Lt. 20 Ruang 2009
JL. Jend. Gatot Subroto,Senayan, Jakarta 10270 INDONESIA
Telp. : (+6221) 575 5810, 575 5812 Fax. : (+6221) 575 5811

PAN

Nomor : 02.1751/PKPF/F-PAN/DPR RI/IX/2024 09 September 2024
Lampiran : -
Perihal : Menyelesaikan Magang di Fraksi PAN DPR RI

Kepada Yth.
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra
Jakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan hormat, Sekretariat Fraksi PAN DPR RI menerangkan bahwa nama di bawah ini:

No	Nama	Jurusan	Keterangan
1	Sulis Setia Ningsih	Aqidah dan Filsafat Islam	STAI Sadra
2	Azizah Amanuroh	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	STAI Sadra

Telah Menyelesaikan magang di Fraksi PAN DPR RI dari tanggal 08 Juli 2024 sampai tanggal 09 September 2024.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 09 September 2024

a,n Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI
Kepala Sekretariat Fraksi PAN DPR RI

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL PAN DPR-RI

Suparno
NIP. 196704281992031003

Lampiran 10

Dokumentasi Kegiatan Praktik Profesi Mahasiswa (PPM)

Gambar 1

Diskusi Fraksi PAN DPR RI

"Polemik pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas agama"

Penulis bersama rekan menjadi panitia pelaksana kegiatan





Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 2

Diskusi Fraksi PAN DPR RI "mewujudkan Fraksi PAN yang sensitif Gender"





Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 3

Foto bersama Ibu DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi JAWA BARAT IV (Komisi X – Anggota)



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 4

Diskusi mingguan yang dilakukan oleh penanggung jawab magang di Fraksi PAN

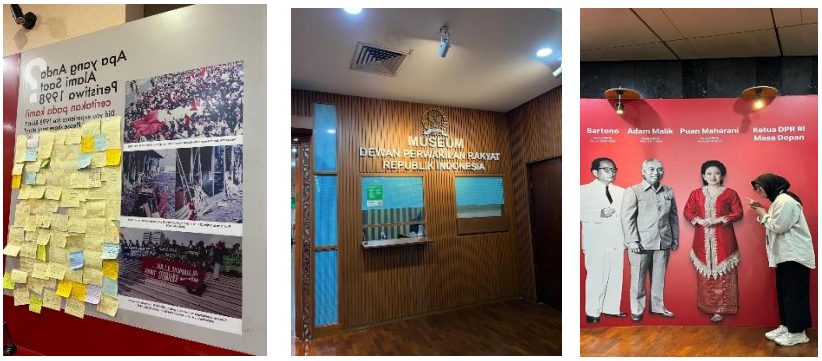
Sumber: Dokumentasi Pribadi



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 5

Kunjungan ke MUSEUM DPR RI



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 6

Kunjungan dan menyusun laporan di PERPUSTAKAAN DPR RI



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 7

Kunjungan Ke KANDANG RUSA



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 8

Berkunjung ROOFTOP DPR RI yang terletak di gedung Fraksi lantai 24



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 9

Suasana Rapat yang berlangsung di DPR RI



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 10

Suasana DPR SAAT DEMO tanggal 22 Agustus 2024



Sumber: Dokumentasi Pribadi

SUASANA AKSI DEMO DILUAR GEDUNG DPR RI



Sumber: Dokumentasi dari PERS JURNAS.OM

Gambar 11

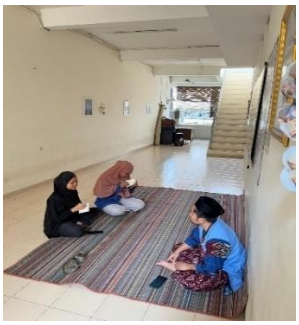
Kunjungan ke GEDUNG NUSANTARA tempat yang akan dipakai acara pidato tahunan Presiden




Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 12

Bimbingan bersama bpk Zaenal Abidin, M.Ud. selama proses kegiatan berlangsung hingga selesai


05 Juli 2024 14 Juli 2024 30 Juli 2024



02 Sepetember 2024

Gambar 13

Presentasi sebagai syarat mendapatkan nilai
Praktik Profesi Mahasiswa di Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI)



Sumber: Dokumentasi Pribadi